BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Tugas pokok dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tertera dalam Undang-undang Dasar 1945 serta perundangan lainnya yang mengatur tentang tugas-tugas pokok pemerintah. Pembangunan merupakan serangkaian upaya yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yaitu telah menjadi hak setiap warga negara dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah sebagai pihak yang menjalankan pelayanan publik yang meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjalankan dan mewujudkan tujuan nasional. Menurut Moenir, A.S (2008: 27) mendefinisikan pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut pelayanan dapat diartikan bahwa pelayanan merupakan kegiatan yang bersifat rutin dan berkesinambungan dalam masyarakat. Bagi negara Indonesia, Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memanfaatkan kekayaan alam setiap daerah secara optimal. Oleh karena itu, pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri (Ghofir, 2000).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sector swasta untuk

menciptakan suatu lapangan kerja baru yang merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999).

Kebijakan otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak Januari 2001, menghendaki masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah agar serta dapat menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang antara lain : meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan (HAW. Widjaja, 2002). Pemerintah pusat memberikan kewewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola potensi yang dimiliki daerah tersebut agar tingkat ketergantungan daerah kepada pusat lebih bisa diminimalisir. Dengan demikian harapannya mampu mencapai tujuan pembangunan nasional. Sebab jika setiap daerah mampu mengoptimalkan potensi masing-masing daerah tersebut baik dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, dan peningkatan kualitas&kuantitas sarana prasarana serta manajemen birokrasi yang jujur dan pengelolaan, transparansi keuangan yang baik kepada masyarakat maka setiap daerah akan dapat bersaing satu sama lain dalam hal bukan saling menindas namun saling memotivasi bagi kemajuan bersama.

Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah diseluruh wilayah Indonesia, sebagai konsekuensi pemerintah pusat memberlakukan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang terfokus pada otonomi daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah daerah diberi kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur anggaran daerahnya sendiri. Penyelenggaraan otonomi daerah

dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan (Penjelasan UU No. 32 Tahun 2004).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan PAD dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasi oleh pemerintah daerah, pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat berbeda antara satu daerah dan daerah lain karena potensi yang berbeda. Selain itu, pajak daerah dan retibusi daerah merupakan bentuk peran serta masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraaan otonomi daerah (Jaka Sriyana, 1999:4).

Melalui pelimpahan kewenangan ini peranan keuangan daerah akan semakin penting karena pemerintah daerah dituntut untuk lebih aktif dalam mengelola sumber dananya sendiri. Artinya daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian keuangan sendiri yang terbesar (Tambunan, 2001). Dalam menyikapi kebijakan otonomi daerah perlu dikaji dan dioptimalkan potensi ekonomi daerah tersebut untuk meningkatkan penerimaan daerah itu sendiri. Semakin meningkat penerimaan dari daerah sendiri, maka sangat memungkinkan daerah dalam mempercepat pembangunan di daerah untuk mensejahterakan penduduknya (Juli Panglima Saragih, 2000).

Wilayah Indonesia dibagi kedalam beberapa tingkat wilayah administratif, yaitu provinsi, kabupaten/kota (dahulu disebut kotamadya), kecamatan, dan desa atau disebut dengan nama lain yang merupakan wilayah administratif terkecil. Pulau

Jawa memiliki beberapa wilayah administrative yaitu terbagi dalam 6 Provinsi antara lain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur. Daerah tersebut merupakan daerah yang dianggap memiliki banyak potensi, bukan hanya budaya nenek moyangnya yang begitu lekat pada setiap masyarakatnya, namun juga beberapa potensi lain seperti sumber daya alam yang hal ini diperoleh sebagai anugerah, bahwa Indonesia merupakan tempat pertemuan 2 rangkaian gunung berapi (*Ring of Fire*) yang dengan demikian daerah tersebut memiliki tanah yang subur. Selain Pulau Sumatera, Pulau Jawa juga terdapat banyak gunung dan pegunungan, total dari gunung dan pegunungan tersebut ialah sebanyak 73 gunung yang tersebar dari ujung timur Pulau Jawa hingga ujung barat. Hal ini yang menjadi indikasi bahwa Pulau Jawa memiliki tanah yang subur. Daratan Pulau Jawa terbujur dari barat ke timur dan diperkirakan memiliki luas wilayah daratan kurang lebih sekitar 126.700 kilometer persegi. Pulau Jawa, merupakan pulau yang terpadat penduduknya per kilometer persegi di Indonesia.

Tabel 1.1

Jumlah Kota, Kabupaten, Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Pulau Jawa Tahun 2008.

no.	Provinsi	Kota	Kabupaten	Luas Wilayah (Km)	Jumlah Penduduk
1	DKI Jakarta	5	1	664.01	7,706,175
2	Jawa Barat	9	17	35,377.76	40,707,250
3	Jawa Tengah	6	29	32,800.69	34,034,177
4	D.I. Yogyakarta	1	4	3,133.15	3,441,614
5	Jawa Timur	9	29	47,799.75	37,872,044
6	Banten	2	4	9,662.92	9,245,075
JUMLAH		33	84	129,438.28	133,006,335

Sumber: Permendagri No.18 2006 dan BPS (telah diolah kembali)

Secara administratif Pulau Jawa dibagi atas 6 Provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur. Provinsi ini juga meliputi beberapa pulau di sekitar Pulau Jawa diantaranya Pulau Madura, Kepulauan Seribu dan Kepulauan Karimun Jawa serta beberapa pulau kecil lainnya yang tersebar di seluruh garis pantai Pulau Jawa. Adapun secara rinci jumlah kota, kabupaten, kecamatan dan kelurahan dapat dilihat dalam Tabel 1.1

Perekonomian Pulau Jawa mempunyai kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian nasional. Kegiatan ekonomi di Indonesia dapat dikatakan terkonsentrasi di wilayah ini. Hal ini ditunjukkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi yang ada di Pulau Jawa memberikan kontribusi lebih dari 50% pada tabel berikut. Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia dapat dilihat dari perbandingan PDRB seluruh Provinsi di Pulau Jawa dengan seluruh Provinsi di Indonesia secara agregat. Bahwa terlihat pada tahun 2007 PDRB Provinsi DKI Jakarta sebesar 332,971,258.84 dan pada tahun 2008 sebesar 353,539,057.43. angka ini menunjukkan perbandingan yang tipis dengan PDRB wilayah Sumatra yaitu sebesar 408,321,074.15 (2007) dan 428,403,023.28 (2008). Setelah dilihat dengan wilayah lain di Indonesia seperti wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, perbedaannya cukup jauh. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta saja dibanding wilayah yang ada di Indonesia cukup mendominasi. Sementara dilihat dari total PDRB seluruh Provinsi yang ada di Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, dan Jawa Timur dengan seluruh wilayah yang ada di Indonesia yaitu wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, wilayah yang terdapat di Pulau Jawa lebih unggul dengan menunjukkan angka yaitu

1,137,414,286.83 (2007) dan 1,204,339,104.86 (2008) dengan 717,827,314.48 (2007) dan 754,594,288.35 (2008). Hal ini tidak mengherankan bahwa pembangunan di daerah Pulau Jawa jauh lebih pesat dibanding wilayah lain yang ada di Indonesia.

Tabel 1.2 Produk Domestik Bruto Menurut Harga Konstan, Wilayah Jawa dan Luar Jawa Tahun 2007/2008

No.	Provinsi/Wilayah	2007	2008
Wilayah Jawa			
1	DKI Jakarta	332,971,253.84	353,539,057.43
2	Jawa Barat	274,180,307.83	290,171,128.80
3	Jawa Tengah	159,110,253.77	167,790,369.85
4	D.I. Yogyakarta	18,291,511.71	19,208,937.56
5	Jawa Timur	287,814,183.92	304,798,966.41
6	Banten	65,046,775.77	68,830,644.80
Total PDRB Wilayah Jawa		**1,137,414,286.83**	**1,204,339,104.86**
Wilayah Luar Jawa			
1	Wilayah Sumatera	408,321,074.15	428,403,023.28
2	Wilayah Kalimantan	166,365,987.16	175,114,840.29
3	Wilayah Sulawesi	84,599,364.77	91,128,054.18
4	Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua	58,540,888.40	59,948,370.59
Total PDRB Wilayah Luar Jawa		**717,827,314.48**	**754,594,288.35**

Sumber: BPS (http://www.bps.go.id/)

Pada buku karangan Khee Giap Tan, Nurina Merdikawati, Mulya amri, dan Kong Yam Ten yang berjudul Analisis Daya Saing Provinsi dan Wilayah: Menjaga Momentum Pertumbuhan, melakukan analisis peringkat daya saing Provinsi dengan Indeks Daya Saing, ACI menelaah hasil dari peringkat daya saing seluruh provinsi-provinsi di Indonesia pada tahun 2014. Peringkat ini dibuat dengan mengurutkan skor tersandardisasi setiap Provinsi. Oleh karena itu, analisis dari peringkat harus dilakukan bersamaan dengan tinjauan dari skor terstandardisasi. Peringkat daya saing keseluruhan merupakan agregasi dari empat lingkup daya saing. Untuk Daya Saing Keseluruhan. Terdapat beberapa hal yang perlu dicatat terkait skor terstandardisasi : penyebarannya (skor maksimum dan minimum), skor rata-rata dan median. Dari penyebarannya, skor terbentang dari nilai maksimum 3,3580 hingga nilai minimum -1,7075. Provinsi dengan skor maksimum adalah DKI Jakarta yang berada diposisi

pertama. Provinsi dengan skor minimum adalah Maluku Utara di posisi ke-33. Tetapi bila dilihat lebih seksama, kecuali DKI Jakarta, 32 Provinsi lainnya berada diantara 1,8152 (Jawa Timur) dan -1,7075 (Maluku Utara). Oleh karena itu DKI Jakarta bias dianggap *outlier* karena skornya (3,3580) jauh lebih tinggi dibandingkan Provinsi lainnya.

Termasuk DKI Jakarta, provinsi dengan kinerja rata-rata (memiliki skor nol) berada diposisi ke-12 (Banten; 0,1672) dan ke-13 (Aceh; -0,0109). Provinsi median yang berada di tengah-tengah adalah adalah Provinsi yang memegang peringkat ke-17 (Sumatera Barat; -0,2179). Skor rata-rata (nol) yang berada di antara peringkat ke-12 dan ke-13 lebih tinggi daripada skor median, yang berarti bahwa angka rata-rata condong ke atas karena skor tinggi yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 1.3 Daya Saing Keseluruhan Tahun 2014 : Peringkat dan Skor

Peringkat 2013	Peringkat 2014	Provinsi	Skor 2014
1	1	DKI Jakarta	3,3580
2	2	Jawa Timur	1,8152
3	3	Kalimantan Timur	1,5566
4	5	Jawa Tengah	1,3262
5	4	Jawa Barat	1,0834
6	6	D.I.Yogyakarta	0,7047
7	11	Sulawesi Selatan	0,6684
8	13	Kalimantan Selatan	0,4884
9	10	Riau	0,3731
10	14	Sulawesi Utara	0,3109
11	8	Kepulauan Riau	0,2901
12	7	Banten	0,1672
13	16	Aceh	-0,0109
14	9	Bali	-0,0179
15	26	Kalimantan Tengah	-0,0754
16	12	Sumatera Selatan	-0,1676
17	17	Sumatera Barat	-0,2179
18	22	Kalimantan Barat	-0,2234
19	19	Sumatera Utara	-0,2594
20	29	Kepulauan Bangka Belitung	-0,2756
21	23	Sulawesi Tengah	-0,3553

22	28	Nusa Tenggara Barat	-0,3733
23	31	Maluku	-0,5685
24	20	Lampung	-0,5773
25	21	Sulawesi Barat	-0,5870
26	30	Papua Barat	-0,7013
27	25	Jambi	-0,7379
28	15	Gorontalo	-0,7549
29	18	Sulawesi Tenggara	-0,7833
30	27	Bengkulu	-0,9576
31	24	Papua	-1,2268
32	33	Nusa Tenggara Timur	-15,634
33	32	Maluku Utara	-17,075

Sumber : Buku Analisis Daya Saing Provinsi dan Wilayah (2014)

Dari data pada tabel tersebut menunjukkan meskipun terjadi kesenjangan yang cukup jauh antara peringkat pertama yaitu Provinsi DKI Jakarta (3,3850) dengan peringkat kedua yaitu Provinsi Jawa Timur (1,8152), namun terlihat bahwa daya saing antar wilayah pada keseluruhan Provinsi di Indonesia tersebut posisi 10 besar didominasi oleh beberapa Provinsi yang wilayah administratifnya terdapat pada Pulau Jawa yaitu Provinsi DKI Jakarta (3,3850), Provinsi Jawa Timur (1,8152), Provinsi Jawa Tengah (1,3262), Provinsi Jawa Barat (1,0834), Provinsi D.I.Yogyakarta (0,7047), dan hanya Provinsi Banten yang terlampau jauh yaitu 0,1672, namun pada tahun 2014 peringkat Provinsi Banten naik dari peringkat 12 (2013) menjadi peringkat 7 (2014).

Indonesia merupakan negara kepulauan atau yang sering disebut negara maritime, dimana Indonesia memiliki banyak pulau-pulau. Wilayah di Indonesia tersebar luas pada pulau-pulau yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Indonesia juga memiliki beberapa wilayah administrative dari yang terbesar yaitu Provinsi hingga yang terkecil yaitu Desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya Pemerintah Pusat sebagai pelaku kebijakan negara Indonesia menetapkan Sistem Otonomi Daerah yang diatur secara formal maupun substansial dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dengan demikian Pemerintah Daerah pada wilayah administrative di

Indonesia lebih leluasa dalam mengelola rumah tangganya masing-masing. Terlihat dari total realisasi penerimaan PAD dari masing-masing wilayah di Indonesia pada Tahun 2015 tercatat Rp. 136,355,998,144

Tabel 1.4 Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan 2011-2015 (Ribu Rupiah)

Jenis Penerimaan	2011	2012	2013	2014	2015
A. Pendapatan Daerah	**140,001,241,096**	**186,010,396,198**	**205,780,279,058**	**233,277,408,354**	**264,056,789,650**
1. Pendapatan Asli Daerah	**73,620,310,358**	**86,541,912,951**	**101,596,400,437**	**121,450,818,035**	**136,355,998,144**
1.1 Pajak Daerah	62,759,000,075	72,996,679,774	86,979,670,640	103,087,606,002	120,326,064,477
1.2 Retribusi Daerah	1,408,726,470	2,645,679,139	1,267,843,490	1,705,308,478	1,731,839,091
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah&Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,524,288,765	2,642,209,423	2,837,923,962	2,972,476,313	3,485,394,400
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	6,928,295,048	8,257,344,615	10,510,962,345	13,685,427,242	10,812,700,176
2. Dana Perimbangan	**52,779,890,539**	**61,998,339,390**	**64,834,193,347**	**68,882,788,511**	**73,294,422,494**
2.1 Bagi Hasil Pajak	16,447,715,087	21,314,535,277	17,781,418,940	17,481,607,781	21,500,061,188
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	12,508,737,244	11,969,460,145	14,299,514,233	15,406,003,394	13,426,024,074
2.3 Dana Alokasi Umum	22,553,282,483	27,381,818,820	30,977,874,897	34,121,932,565	35,971,973,787
2.4 Dana Alokasi Khusus	1,270,155,725	1,332,525,148	1,775,385,277	1,873,244,771	2,396,363,445
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	**13,601,040,199**	**37,470,143,857**	**39,349,685,274**	**42,943,801,808**	**54,406,369,012**
B. Pembiayaan Daerah	**20,503,199,782**	**26,442,574,719**	**31,556,200,366**	**28,435,496,655**	**23,661,436,136**
Jumlah/Total	**160,504,440,878**	**212,452,970,917**	**237,336,479,424**	**261,712,905,009**	**287,718,225,786**

Pada Tabel Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia menurut Provinsi menunjukkan bahwa PAD berdasarkan Provinsi dari tahun 2011 hingga 2015 menunjukkan bahwa Penerimaan Daerah pada klasifikasi Pendapatan Asli Daerah, menunjukkan bahwa Pajak Daerah merupakan pendapatan terbesar sebuah daerah dengan peningkatan setiap tahunnya yang signifikan yaitu sebesar Rp. 62,759,000,075 (2011), Rp.72,996,679,139 (2012), Rp. 86,979,670,640 (2013), Rp. 103,087,606,002 (2014), dan Rp. 120,326,064,477. Hal ini berarti menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Daerah sangatlah besar dalam realisasi pembiayaan daerah untuk pembangunan wilayah administrative.

Dapat dilihat juga dari sudut pandang Provinsi DKI Jakarta dimana terdapat Ibu Kota Negara Indonesia bahwa DKI Jakarta termasuk daerah yang mempunyai hak otonomi daerah, untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Dapat dilihat bahwa PAD DKI Jakarta tahun 2015 sebesar Rp. 33.686.176.820 yang dimana jumlah tersebut terbesar dibanding dengan Provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Dapat diketahui bahwa DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan PAD adalah melalui Pajak Daerah. Pajak sebagai salah satu sumber yang terhitung paling tangguh dalam PAD perlu ditingkatkan pemanfaatannya, antara lain dengan melakukan kebijaksanaan yang akan ditempuh, yaitu dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pajak daerah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak bagi pembangunan bangsa. Jenis-jenis pajak daerah di DKI Jakarta menurut ketentuan dasar yang ada di Perda no. 4 tahun 2002 tentang ketentuan umum pajak daerah, terdiri dari : Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Bahan Kendaraan Bermotor(PBBKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB), Pajak Kendaraan Bermotor(PKB), Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir, Pajak Reklame. Gambaran struktur pajakdaerah di DKI Jakarta dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut :

Tabel 1.5

Struktur Pajak Daerah di DKI Jakarta tahun 2015
(Rupiah)

No	Jenis Pajak Daerah	Penerimaan	% Terhadap Pajak Daerah
1	PKB	6.090.200.500	21
2	BBNKB	4.685.403.430	16
3	PBBKB	1.232.836.930	4
4	P. Hotel dan Restoran	3.566.541.080	12
5	P. Hiburan	608.799.680	2
6	P. Reklame	714.967.330	2
7	P. Penerangan Jalan	729.884.590	3
8	P. Lain – lain	11.448.293.040	39
Jumlah		29.076.926.600	100

Sumber :DKI Jakarta Dalam Angka 2016,BPS(data diolah)

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa sumbangan terbesar terhadap pajak daerah DKI Jakarta pada tahun 2015 berasal dari sektor pajak lain-lain. Pada tahun 2015 sektor pajak lain-lain memberikan sumbangan terhadap pajak daerah sebesar Rp. 11.448.293.040. Hal ini terbukti pada tahun 2015 pajak lain-lain memberikan kontribusi penerimaan sebesar 39% dari total keseluruhan penerimaan pajak daerah DKI Jakarta. Gambaran target dan realisasi pajak daerah di DKI Jakarta selama tahun 1999-2015 dapat dilihat pada Tabel 1.6 berikut :

Tabel 1.6
Target dan Realisasi Pajak Daerah DKI Jakarta Tahun 1999-2015

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
1	1999	1.163.790.800	1.481.274.500	127
2	2000	1.497.848.800	2.118.274.500	141
3	2001	2.792.190.000	3.056.748.100	109
4	2002	3.181.870.000	3.703.572.700	116
5	2003	4.101.581.600	4.401.724.700	107
6	2004	5.286.030.100	5.498.478.300	104
7	2005	6.115.192.300	6.499.708.700	106
8	2006	7.149.000.000	6.482.649.200	91
9	2007	8.334.270.000	7.202.527.400	86

10	2008	8.484.270.000	8.751.273.800	103
11	2009	8.615.000.000	8.560.134.900	99
12	2010	10.083.000.000	10.751.745.200	107
13	2011	13.965.000.000	15.221.249.800	109
14	2012	16.525.000.000	17.721.493.020	107
15	2013	22.618.000.000	23.367.019.000	103
16	2014	32.500.000.000	27.050.949.020	83
17	2015	32.581.650.000	29.076.926.600	89

Sumber : Target dan Realisasi Pendapatan Daerah DKI Jakarta, BPS berbagai edisi (data diolah)

Berdasarkan pada tabel diatas jumlah realisasi pajak daerah terhadap targetnya secara umum mengalami kenaikan, hal ini dapat diketahui dari tahun 1999-2015 realisasi pajak daerah telah melampaui target yang ditetapkan. Hanya saja realisasi dari target di tahun 2006, 2007, 2009, 2014, 2015 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena tingginya target penerimaan dari sektor pajak daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak seimbang dengan kondisi realisasi target ditahun sebelumnya. Berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Sumber-Sumber Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Gambaran persentase penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta tahun 2015dapat dilihat pada Tabel 1.7

Tabel 1.7 Persentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerahdi DKI Jakarta tahun 2015
(Rupiah)

No	Uraian	Penerimaan	% Terhadap PAD
1	Pajak Daerah	29.076.926.600	86
2	Retribusi Daerah	459.459.500	1
3	HPKD yang dipisahkan	527.280.490	2
4	Penerimaan Lain-lain	3.622.510.230	11
Jumlah PAD		33.686.176.820	100

Sumber :DKI Jakarta 2016, BPS(data diolah)

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta sebagian besar berasal dari hasil pajak daerah dan hasil penerimaan lain-lain. Hal ini dapat diketahui dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil pajak daerah sebesar Rp. 29.076.926.600 dan penerimaan lain-lain sebesar Rp.3.622.510.230. Pajak daerah mempunyai kontribusi sebesar 86% dan Penerimaan lain-lain memiliki kontribusi sebesar 11% dari total keseluruhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. Berdasarkan hal itu pemerintah daerah DKI Jakarta selalu berupaya untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah khususnya dengan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah. Dengan kontribusi pajak daerah yang semakin besar terhadap PAD, maka pemerintah DKI Jakarta akan semakin leluasa dalam memanfaatkan dana yang ada, sekaligus akan menambah kepercayaan diri untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan demi membantu negara untuk mencapai tujuan nasional.

Setelah melihat dari beberapa kenyataan yang terjadi, maka peneliti tertarik meneliti tentang Pajak Daerah sebab mengganggap bahwa hal tersebut begitu penting untuk kemajuan nasional dengan melakukan penelitian mengenai Penerimaan Pajak Daerah berdasarkan 5 Provinsi di Pulau Jawa serta mendalami faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penerimaan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah pada 5 Provinsi di Pulau Jawa?
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap penerimaan pajak daerah pada 5 Provinsi di Pulau Jawa?
4. Bagaiman pengaruh Jumlah Industri terhadap penerimaan pajak daerah pada 5 Provinsi di Pulau Jawa?

5. Bagaimana pengaruh Belanja Daerah terhadap penerimaan pajak daerah pada 5 Provinsi di Pulau Jawa?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bagaimana pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah pada 5 Provinsi di Pulau Jawa?
2. Menganalisis bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap penerimaan pajak daerah pada 5 Provinsi di Pulau Jawa?
3. Menganalisis bagaimana pengaruh Jumlah Industri Besar dan Sedang terhadap penerimaan pajak daerah pada 5 Provinsi di Pulau Jawa?
4. Menganalisis bagaimana pengaruh Belanja Daerah terhadap penerimaan pajak daerah pada 5 Provinsi di Pulau Jawa?

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya penerapan teori perpajakan.
2. Secara umum dengan adanya penelitian ini kepada pemerintah diharapkan dapat dijadikan masukan dalam menentukan kebijakan ekonomi pada suatu daerah serta dapat memberikan informasi secara luas kepada masyarakat bahwa sector pajak merupakan hal yang penting.

1.4 Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan terdiri dari lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

   Isi dari Pendahuluan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teori.

   Kajian pustaka merupakan pengkajian dari hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan. Sedangkan landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada.

3. Bab III Metode Penelitian.

   Pada bab ini menguraikan tentang jenis dan cara mengumpulkan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

4. Bab IV Hasil dan Analisis.

   Dalam bab ini terdapat dua subbab yaitu diskripsi data penelitian yang berupa pemaparan data yang digunakan dalam penelitian dan hasil serta analisis yang merupakan temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisisnya.

5. Bab V Simpulan dan Implikasi.

   Simpulan merupakan simpulan dari hasil analisis yang dilakukan sebelumnya. Implikasi merupakan hasil dari simpulan dan digunakan sebagai jawaban atas rumusan masalah.

6. Bagian Akhir

   Bagian akhir terdiri dari dua hal yaitu:

   a. Daftar pustaka

      Daftar pustaka disusun seperti pada proposal penelitian.

   b. Lampiran

      Lampiran digunakan untuk menempatkan data atau keterangan lain yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam bagian inti.